

ABSTRACT:

Over the decades, policy capacity is gained momentum in the public policy discourse and it obvious from the literature that different units of government agencies or organisations require different capacities. Policy capacity is understood around government but the concept has been broadened to include other organisations such as private, NGOs, among others. This research focused on organisational capacity in the lens of policy analytical capacity through an evidence-based approach to emphasise the importance of information to policy decisions.

This research employed PRISMA SLR to examined the capacities of policy to end deforestation and its related discourse around environmental issues as well as the relevance of the information to environmental decision-making. The rationale of employing PRISMA SLR is to synthesize and review the existing literature on policy capacity and environmental issues. This research aimed to discuss policy capacity in relation to end deforestation problem and information gap in the forest sector. The researcher employed PRISMA research protocol to examine policy capacity discourse in public policy studies and segments his search strategy for journal articles in Scopus and Web of Science index journals into three aspects of capacity studies such as policy capacity, organisational capacity, and policy analytical capacity. The data selection and rejection went through PRISMA statement 2015 that is an authentic eligibility criterion for study inclusion and exclusion process. Then, seventy-three (73) studies are selected and reviewed under this study which is classification in the following areas such as, policy capacity, organisational capacity, policy analytical capacity and deforestation. The literature on the three aspects of policy capacity mentioned above is mapped according to subject area and country to ascertain weak scientific publications among developing countries as compared to developed countries.

In accordance with PRISMA SLR, policy capacity is viewed as a panacea to improving governance system of any country or organisation because it involves knowledge, competencies, and skills to process information in order to make the intelligent collective choice. It is common agreement among the policy scholars that policy capacity is a determinant to improve policy outcome and it helps the policy actors to be able to solve policy problems with aid of accurate and reliable information. The study revealed from the literature that policy capacity is weak in most organisations and where it is not, it is not recognised. The results show that most literature reviewed under this research is based on qualitative research which helps to understand the concept of capacity at different point of view and established complex relationship on issues. Needless to say, quantitative research in policy capacity may be valuable to forest management as it will help to better understand the subtle of forest policy problems and offer solutions to those problems.

KEYWORD: Policy capacity. deforestation, PRISMA SLR, public policy, governance system, organisation.

ABSTRAK

Selama beberapa dekade, kapasitas kebijakan memperoleh momentum dalam wacana kebijakan publik dan terlihat jelas dari literatur bahwa unit atau organisasi pemerintah yang berbeda memerlukan kapasitas yang berbeda. Kapasitas kebijakan dipahami di sekitar pemerintah tetapi konsepnya telah diperluas hingga mencakup organisasi lain seperti swasta, LSM, dan lain-lain. Penelitian ini difokuskan pada kapasitas organisasi dalam lensa kapasitas analisis kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti untuk menekankan pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan PRISMA SLR untuk menguji kapasitas kebijakan untuk mengakhiri deforestasi dan wacana terkait seputar isu lingkungan serta relevansi informasi dengan pengambilan keputusan lingkungan. Alasan menggunakan PRISMA SLR adalah untuk mensintesis dan mereview literatur yang ada tentang kapasitas kebijakan dan isu lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kapasitas kebijakan terkait dengan mengatasi masalah deforestasi dan kesenjangan informasi di sektor kehutanan. Peneliti menggunakan protokol penelitian PRISMA untuk mengkaji wacana kapasitas kebijakan dalam kajian kebijakan publik dan membagi strategi pencarian artikel jurnal di jurnal indeks Scopus dan Web of Science ke dalam tiga aspek kajian kapasitas yaitu kapasitas kebijakan, kapasitas organisasi, dan kapasitas analisis kebijakan. Pemilihan dan penolakan data telah melalui pernyataan PRISMA 2015 yang merupakan kriteria kelayakan otentik untuk proses inklusi dan eksklusi studi. Kemudian, tujuh puluh tiga (73) studi dipilih dan ditinjau dalam studi ini yang diklasifikasikan dalam bidang-bidang berikut seperti, kapasitas kebijakan, kapasitas organisasi, kapasitas analisis kebijakan dan deforestasi. Literatur tentang ketiga aspek kapasitas kebijakan tersebut di atas dipetakan menurut bidang studi dan

negaranya untuk memastikan lemahnya publikasi ilmiah antar negara berkembang dibandingkan dengan negara maju.

Sesuai dengan PRISMA SLR, kapasitas kebijakan dipandang sebagai obat mujarab untuk memperbaiki sistem tata kelola negara atau organisasi mana pun karena melibatkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan untuk mengolah informasi guna membuat pilihan kolektif yang cerdas. Sudah menjadi kesepakatan bersama di antara para ahli kebijakan bahwa kapasitas kebijakan merupakan penentu untuk meningkatkan hasil kebijakan dan membantu para pelaku kebijakan untuk dapat menyelesaikan masalah kebijakan dengan bantuan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Studi tersebut mengungkapkan dari literatur bahwa kapasitas kebijakan lemah di sebagian besar organisasi dan jika tidak, kapasitas tersebut tidak diakui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar literatur yang ditinjau dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif yang membantu untuk memahami konsep kapasitas pada sudut pandang yang berbeda dan membangun hubungan yang kompleks dalam berbagai isu. Tak perlu dikatakan, penelitian kuantitatif dalam kapasitas kebijakan mungkin berharga bagi pengelolaan hutan karena akan membantu lebih memahami seluk-beluk masalah kebijakan kehutanan dan menawarkan solusi untuk masalah tersebut.

KEYWORD: Kapasitas kebijakan, deforestasi, PRISMA SLR, kebijakan publik, sistem tata kelola, organisasi.